

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS
(DAFTAR G) JENIS *CARNOPHEN* DI KALANGAN NELAYAN
(Studi di Polres Lamongan)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AHMAD FAIZAL RUSDIANTO

NIM. 115010102111004



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2015

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS
(DAFTAR G) JENIS *CARNOPHEN* DI KALANGAN NELAYAN
(Studi di Polres Lamongan)**

Ahmad Faizal Rusdianto, Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum, Ardi Ferdian, SH.,
M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Ahmadfaizal69@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 1). Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan. 2). Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analisis*. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan di Kabupaten Lamongan terdapat 2 kendala. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba yang pertama adalah 1) kendala internal yang dihadapi Satuan Reserse Polres Lamongan yakni terbatasnya jumlah personil, serta terbatasnya sarana dan prasarana. 2) kendala eksternal yang dihadapi Satuan Reserse Polres Lamongan yakni kurangnya pemahaman tentang hukum masyarakat, lokasi target operasi yang jauh, sulitnya mengungkap jaringan pelaku pengedar, serta adanya putusan pengadilan yang ringan. Sedangkan upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala tersebut ada 2 yaitu upaya internal dan eksternal, untuk upaya internal dilakukan dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia dan kerjasama dengan polsek setempat, upaya eksternal dilakukan pemasangan baliho, sosialisasi kegiatan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi antar wilayah, serta upaya penanggulangan terhadap putusan pengadilan yang ringan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peredaran, Obat Keras (daftar G) jenis *Carnophen*

**PREVENTION OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING (G LIST)
CARNOPHEN TYPE AMONG FISHERMEN
(Study at Polres Lamongan)**

*Ahmad Faizal Rusdianto, Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum, Ardi Ferdian, SH.,
M.Kn.*

Fakulty of Law Brawijaya University

Email: Ahmadfaizal69@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research are 1). To identify, describe, and analyze the problem hampers Narcotics Investigation Unit Polres Lamongan to prevent illegal drug trafficking (G list) Carnophen type among fishermen. 2) To identify, describe, and analyze Police Narcotics Investigation Unit Lamongan effort to prevent illegal drug trafficking (G list) Carnophen type among fishermen. Empirical research method with socio-juridical approach was used in this research. Primary and secondary data was obtained and analyzed thru descriptive analysis method. The results of this research, by utilizing the above method, indicate that there are two problems for Police Narcotics Investigation Unit Lamongan effort to prevent illegal drug trafficking (G list) Carnophen type among fishermen. The problems are 1) internal problem specifically the lack of personnel and infrastructure. 2) external problem specifically the lack of public awareness about the law, distances of operation target location, the difficulty to uncover the perpetrators network of drug dealer, and light court ruling. Furthermore, the efforts that Police Narcotics Investigation Unit Lamongan to address the above problems can be divided into internal and external. Internal effort is done by maximizing human resources and cooperating with local police. External efforts is done by socialization and public education through billboard and counseling, improve local police coordination for each region, and prevention of light court ruling.

Keyword : *Prevention, drug trafficking, Drugs (G list) Carnophen type*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM Indonesia yang berkualitas.

Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat–obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Penyalahgunaan narkoba bukan hal baru di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya obat–obatan terlarang, mengalami peningkatan setiap tahun. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang tidak hanya terjadi di Kota Besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang juga marak terjadi di daerah. Hasil studi sebelumnya pada Tahun 2014, peredaran obat terlarang sudah merambah Provinsi Jawa Timur, yakni di wilayah Kabupaten Tuban. Dalam studi tersebut dikaji mengenai penyebab terjadinya peredaran obat terlarang.²

Peredaran obat terlarang di Jawa Timur, tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban. Obat terlarang juga beredar di wilayah Kabupaten Lamongan, yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil *pra survey* di Satuan Resnarkoba Polres Lamongan terkait kasus penyalahgunaan narkoba dari Tahun 2012 sampai 2014 diperoleh data peningkatan jumlah tersangka. Tahun 2012 terjadi 39 kasus dan 47 tersangka dan ditemukan jenis barang bukti berupa sabu 3 poket dan inx 1 butir, 125

¹ Siswanto sunarso, **Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum**, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm 5

²MA Tabrani, **Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, 2014, hlm 65

butir pil double L dan pil *Carnophen* sebanyak 3.631 butir. Tahun 2013 kasus narkoba meningkat sebanyak 51 kasus dan 64 tersangka serta ditemukan barang bukti berupa sabu 0,78 gram + 1 Poket, ganja 12, 05 gram, 529 pil double L dan pil *Carnophen* sebanyak 9.031 butir. Tahun 2014 terjadi 45 kasus dan sebanyak 65 ditetapkan sebagai tersangka serta ditemukan barang bukti berupa sabu 44,15 gram + 9 poket, 7720 butir pil double L dan pil *Carnophen* sebanyak 11.554 butir.³

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kabupaten Lamongan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelaku pengedar dan pengguna obat-obatan terlarang mulai dari kalangan anak muda sampai nelayan. Jenis obat terlarang yang sering digunakan oleh nelayan adalah *Carnophen*. Pada 28 Januari 2015, sebuah berita yang dimuat di koran lokal dengan judul “*Edarkan Carnophen, Nelayan Ditangkap*” menyebutkan bahwa Satresnarkoba Polres Lamongan kembali menangkap pengedar *Carnophen*. Pelaku adalah seorang nelayan ,Beny Ardiansyah, warga perumahan Bong Ris Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran. Hasil penggeledahan berhasil ditemukan 100 butir *Carnophen* di balik saku jaket dan 2.440 butir yang disimpan di dalam almari kamar tidurnya.⁴

Maraknya kasus peredaran obat-obat terlarang khususnya *Carnophen* di kalangan nelayan menyebabkan pihak kepolisian melakukan beberapa upaya pemberantasan. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan obat keras (daftar G) *Carnophen* pada nelayan adalah dapat memberikan efek ketergantungan yang tinggi bagi pemakai. Pemakai menganggap menggunakan *Carnophen* merupakan suatu kebutuhan untuk menambah stamina (*doping*), penghangat badan, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.⁵

Faktor penyebab tingginya penyalahgunaan *Carnophen* pada nelayan adalah kemudahan nelayan dalam mendapatkan barang tersebut. Nelayan dapat membeli *Carnophen* dengan harga yang terjangkau dan dapat memperolehnya

³Hasil Pra Survei Data Ungkap Kasus SatResnarkoba Polres Lamongan Tahun 2015 pada tanggal 2 februari 2015

⁴Jawa Pos, **Edarkan *Carnophen* Nelayan Ditangkap**, edisi 30 Januari 2015, hlm 38

⁵Hasil wawancara Prasurvei dengan AIPTU Jinanto selaku Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin 2 februari 2015

dari rekan sesama nelayan.⁶ Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini diharapkan mampu menurunkan peredaran pil jenis *Carnophen* di kalangan nelayan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Mencermati latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis merasa perlu mengangkat untuk memberikan analisis upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan di Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan ?
2. Bagaimana upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan ?

C. Pembahasan

1. Metode penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.⁷ Penelitian ini dilakukan di Polres Lamongan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan Pihak Satuan Reserse Polres Lamongan yang menangani kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis

⁶Hasil wawancara Prasurvei dengan AIPTU Jinanto selaku Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu 4 februari 2015

⁷Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10

Carnophen di kalangan nelayan,⁸ dan data sekunder diperoleh dari dokumen. Dengan Teknik analisis data menggunakan metode *Deskriptif Analisis*.

2. Hasil penelitian

A. Realita Kasus Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (daftar G) Jenis *Carnophen* di Kalangan Nelayan di Kabupaten Lamongan

Kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan kini sudah menjadi fokus permasalahan utama oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamongan. Kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) yang ditangani oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.⁹ Hal ini dapat dilihat dari data, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Kasus dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (daftar G) Jenis *Carnophen* Tahun 2012–Tahun 2015 (Januari – April)

No	Tahun	Jumlah		Jumlah Barang Bukti
		Kasus	Tersangka	
1.	2012	35	43	3.631 butir Pil <i>Carnophen</i>
2.	2013	51	60	9.031 butir Pil <i>Carnophen</i>
3.	2014	39	56	11.554 butir Pil <i>Carnophen</i>
4.	2015 (Januari- April)	6	7	2.746 butir Pil <i>Carnophen</i>
Jumlah		131	166	26.962 butir Pil <i>Carnophen</i>

(Sumber: data sekunder diolah, 2015)

⁸Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106

⁹Hasil wawancara dengan ibu Ipda Sri iswati Kaur Binops SatResnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 15 April 2015 pukul 09.00 Wib.

Tabel 4.2 di atas menggambarkan mengenai jumlah kasus dan tersangka tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) khusus untuk *Carnophen* yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Jumlah kasus mengalami kenaikan dari Tahun 2012 ke 2013, tetapi mengalami penurunan kembali pada 2014. Meskipun demikian, jumlah tersangka ternyata tidak berkurang banyak. Terjadi penurunan kasus sebanyak 12 kasus dari Tahun 2013 ke 2014 tetapi penurunan tersangka hanya 4 tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka yang ditangkap di setiap kasus pada 2014 mengalami peningkatan. Dengan kata lain, tersangka yang ditangkap bersifat kelompok.

Dilihat dari jumlah barang bukti yang disita, diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah barang bukti. Jumlah kasus yang sempat mengalami penurunan pada 2014 tidak berhubungan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan. Jumlah barang bukti yang disita dari Tahun 2012 sampai Tahun 2014 mengalami kenaikan hampir 4 (empat) kali lipat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak Satresnarkoba Polres Lamongan. Data realita kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* dilihat dari jenis pekerjaan pelaku pengedar, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Realita Kasus Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) jenis *Carnophen* dari Pola Pekerjaan Tahun 2011-2015 (Januari-April)

No	Pekerjaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Nelayan	31	34	51	53	7
2	Wiraswasta	5	6	6	1	-
3	Mahasiswa/Pelajar	2	3	3	2	-
Total		38	43	60	56	7

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015)

Tabel 4.3 menunjukkan keterkaitan pekerjaan dengan peredaran obat keras (Daftar G) jenis *Carnophen*. Jenis pekerjaan yang terkait dengan peredaran obat keras *Carnophen* adalah nelayan, wiraswasta dan mahasiswa/pelajar. Posisi pertama adalah nelayan. Profesi nelayan merupakan jenis pekerjaan paling banyak menggunakan/mengonsumsi obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber bahwa *Carnophen* pada nelayan digunakan

sebagai penambah stamina ketika mencari ikan di laut. Nelayan beranggapan bahwa setelah mengkonsumsi pil *Carnophen* efek yang dirasakan adalah badan merasa kuat ketika berada di tengah laut dan tubuh menjadi hangat. Latar belakang tersebut yang menyebabkan penggunaan *Carnophen* pada nelayan baik secara sadar maupun tidak masih sangat tinggi.

B. Kendala yang Dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis *Carnophen* di Kalangan Nelayan

Penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* oleh Satresnarkoba Polres Lamongan sudah dilakukan secara maksimal. Berikut merupakan kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan. Kendala tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal, yaitu:¹⁰

1. Kendala Internal

Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya dari aspek penegak hukum sendiri,¹¹ Kendala internal yang diidentifikasi di Satresnarkoba Polres Lamongan antara lain:¹²

a. Terbatasnya Jumlah Personil Satresnarkoba Polres Lamongan

Terbatasnya sumber daya manusia Satresnarkoba Polres Lamongan menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*, karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di Kabupaten Lamongan, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki Satresnarkoba Polres Lamongan.

Jumlah personil Satresnarkoba Polres Lamongan sebanyak 15 orang.

Pihak Satresnarkoba Polres Lamongan mengakui jumlah personil

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S, SH selaku Kepala Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 09.00 WIB, diolah 2015

¹¹Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35

¹²Hasil wawancara dengan bapak AIPTU Jinanto, SH selaku Kaurmintu Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 17 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

terbatas, sehingga dalam melakukan kegiatan operasi pihak Satresnarkoba bekerjasama Unit Reskrim Polsek Paciran dan Unit Reskrim Polsek Brondong yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara.¹³

Bisa dilihat dari perkembangan angka tindak pidana setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satresnarkoba yang ada di kantor maupun yang terjun di lapangan dalam penangkapan pelaku pengedar. Tidak semua petugas ikut dalam penangkapan, hanya sebagian petugas yang ikut dalam operasi dan sebagian petugas bekerja sesuai dengan tugas masing-masing di kantor.¹⁴

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan kendala internal yang dihadapi Satresnarkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan. Hal ini disebabkan karena Satresnarkoba Polres Lamongan terkendala oleh minimnya anggaran untuk menangani semua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Lamongan, Sedangkan anggaran yang diterima dari Negara tidak sebanding dengan jumlah penanganan kasus narkoba yang meningkat setiap tahunnya.¹⁵

Selain kendala yang sudah disebutkan diatas terbatasnya sarana, dan prasarana yang dihadapi Satresnarkoba yaitu penyediaan ruang penjara bagi narapidana jumlahnya terbatas. Jumlah penjara tidak sebanding dengan jumlah pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibuatlah kesepakatan bersama yang tidak tertulis antara tiga unsur penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bahwa “pelaku pengedar yang tertangkap kedapatan membawa barang bukti dibawah 50

¹³Hasil wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S, SH selaku Kepala Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 09.00 WIB, diolah 2015

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ipda Bin Hudoyo, SH selaku Kepala Unit Idik II Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 09.00 WIB, diolah 2015

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Moch. Andi Lilik S.,SH Kasat Satresnarkoba pada Tanggal 21 April 2015, diolah 2015

butir tidak dapat diproses hukum”.¹⁶ Kesepakatan tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah pelaku pengedar yang tertangkap tangan agar bisa efisien dalam pelaksanaan penegakan hukum.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum

Pemahaman hukum terhadap penyalahgunaan *Carnophen* masih rendah pada masyarakat nelayan sebagai pengguna utama pil *Carnophen*. Masyarakat nelayan tidak memahami bahwa pil *Carnophen* dilarang untuk dikonsumsi tanpa izin dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Pemahaman terhadap hukum ini bisa disebabkan karena latar belakang pendidikan masyarakat pesisir yang masih rendah.¹⁷ Sementara pemahaman hukum pelaku pengedar hanya terbatas bahwa pil *Carnophen* merupakan obat yang terlarang untuk dikonsumsi dan diedarkan.

Tetapi pelaku pengedar masih tetap melakukan penyalahgunaan. Satresnarkoba Polres Lamongan sudah berupaya melakukan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pemasangan baliho/spanduk dan sosialisasi penyuluhan akan tetapi mereka belum mengetahui dan belum paham terkait penyalahgunaan narkoba.

b. Lokasi Target Operasi Jauh

Target wilayah operasi penyalahgunaan *Carnophen* terletak di 2 (dua) Kecamatan yaitu di Kecamatan Paciran dan Brondong berlokasi kurang lebih 43 Km dari Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan. Kondisi jalan menuju lokasi penangkapan merupakan jalan poros utama Provinsi akses menuju target operasi penangkapan terletak di pesisir pantai utara. Jarak yang jauh ini membuat jumlah personil yang terbatas juga lebih berat

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Moch. Andi Lilik S.,SH Kasat Satresnarkoba pada Tanggal 21 April 2015, diolah 2015

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak AKP Andi Lilik S, SH selaku KASAT Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

tugasnya dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*.¹⁸

Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan *Carnophen* sudah cukup bagus. Tetapi dalam memberikan informasi masyarakat langsung menghubungi Satresnarkoba Polres Lamongan. Laporan masyarakat ini tidak melalui Polsek setempat terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan Satresnarkoba Polres Lamongan kehilangan jejak karena lokasi kejadian perkara jaraknya jauh.

Terkait dengan lokasi penangkapan pelaku pengedar *Carnophen* dikalangan nelayan, pihak Satresnarkoba Polres Lamongan juga menemui kendala terhadap tempat yang digunakan untuk transaksi peredaran pil tersebut, karena peredarannya dilakukan tidak hanya di darat melainkan juga di laut, transaksi jual beli obat tersebut dilakukan di atas perahu milik nelayan, jadi petugas yang terjun dilapangan kesulitan untuk mengungkap peredaran *Carnophen* yang dilakukan di perairan.¹⁹

c. Sulitnya Mengungkap Jaringan Pelaku Pengedar

Sejauh ini penangkapan terhadap pelaku pengedar obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* yang peredaran di kalangan nelayan sudah di jalankan dengan baik dan maksimal oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamongan. Namun di dalam pelaksanaan terdapat kendala dari sisi penangkapan bandar *Carnophen*. Pihak Satresnarkoba ketika melakukan penangkapan pelaku pengedar obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* yang dilakukan di lapangan menemui kendala berupa putusnya pengembangan rantai pelaku sampai keatas (bandar pil *Carnophen*).

d. Putusan Pengadilan yang Ringan

Putusan Pengadilan yang ringan menjadi kendala utama Satresnarkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* tersebut. Karena dengan adanya putusan

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak AKP Andi Lilik S, SH selaku KASAT Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak APTU Jinanto SH selaku Kaurmintu Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

yang ringan tersebut pelaku pengedar tidak jera dan mereka akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tidak sedikit para pelaku yang mengulangi perbuatan dan ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan bahkan ada yang sampai 5 kali tertangkap.²⁰

C. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis *Carnophen* di Kalangan Nelayan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana dan pencegahan hukum pidana.²¹ Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan sudah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan. Upaya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Lamongan meliputi upaya preventif dan represif.²² Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang selama ini sudah dijalankan secara maksimal oleh pihak Satresnarkoba diantaranya: pemasangan baliho/spanduk himbauan, penyuluhan hukum dan razia, serta upaya represif yang sudah dilakukan dengan baik selama ini untuk menekan angka tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) meliputi:²³ Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemusnahan barang bukti.

1. Upaya Internal

a. Upaya Penanggulangan Terbatasnya Jumlah Personil

Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menghadapi kendala terbatasnya jumlah personil untuk melakukan penangkapan pelaku pengedar selama ini telah ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama antara Satresnarkoba Polres Lamongan dengan Polsek terkait.²⁴

²⁰Hasil wawancara dengan bapak AKP Andi Lilik S, SH selaku Kepala Satuan Resnarkoba Polres Lamongan, pada 13 April 2015, Pukul 11.00 WIB diolah 2015

²¹ Kusno Adi, **Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak**, UMM Press, Malang, 2009, hlm 100

²²Soedjono D, **Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*)** Alumni, Bandung, 1976, hlm 31

²³ Hasil Wawancara dengan bapak Ipda Bin Hudoyo selaku Kepala Unit Idik II Satresnarkoba Polres Lamongan, Pada 15 April 2015 Pukul 09.00, diolah 2015

²⁴Hasil wawancara dengan bapak AKP Andi Lilik S, SH selaku KASAT Resnarkoba Polres Lamongan, pada 13 April 2015, Pukul 11.00 WIB diolah 2015

Dari sini upaya penanggulangan dari terbatasnya jumlah personil yang seharusnya dilakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya dari masing-masing personil/Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang ada, sehingga dengan memaksimalkan kinerja dan sumberdaya manusia yang ada diharapkan pihak Satresnarkoba Polres Lamongan dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran dan penangkapan pelaku pengedar *Carnophen*. Sedangkan untuk jumlah personil yang ada saat ini hanya 15 personil dan tidak semuanya ikut terjun di dalam proses penangkapan, seharusnya idealnya jumlah personil yang ada harus seimbang dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan, mengingat bahwa kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Lamongan semakin kompleks dan perkara yang ditangani tidak hanya perkara penyalahgunaan peredaran obat *Carnophen* saja. Jika memang kondisi internal Satresnarkoba Polres Lamongan kekurangan personil maka perlu dilakukan *recruitment* tenaga baru. Oleh karena itu pihak Satresnarkoba perlu melakukan penambahan jumlah personil untuk masing-masing Unit yang bertugas melakukan penangkapan pelaku pengedar.

b. Upaya Penanggulangan Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal pokok untuk mengungkap kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftarG) jenis *Carnophen*. karena sarana bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan kegiatan oprasional sehingga dapat terlaksana secara optimal. Kendala sarana prasarana terkait terbatasnya jumlah penjara diatasi oleh Satresnarkoba Polres Lamongan dengan membuat kerjasama tidak tertulis antar 3 lembaga tinggi negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kerjasama tersebut berisi kesepakatan bahwa pemrosesan pelaku penyalahgunaan *Carnophen* hanya bisa diproses jika barang bukti yang diperoleh lebih dari 50 butir.²⁵ Hal ini justru dapat meningkatkan penyalahgunaan *Carnophen* dengan modus pengedaran di bawah 50 butir. Pihak Satresnarkoba mengajukan permohonan perluasan sarana prasarana khususnya penjara untuk para pelaku pengedar pil *Carnophen*, sehingga

²⁵Hasil wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S, SH selaku Kepala Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 09.00 WIB, diolah 2015

terdapat efek jera yang cukup untuk menampung para pelaku pengedar. hal ini harus dikombinasikan dengan solusi lain seperti putusan pengadilan yang berat dan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat. Sehingga yang ditangkap adalah memang masyarakat yang sadar akan perbuatannya dan siap menanggung segala resiko atas perbuatannya.

2. Upaya Eksternal

Upaya Eksternal merupakan upaya untuk menjawab hambatan/kendala eksternal yang meliputi kurangnya pemahaman tentang hukum, jarak lokasi penangkapan yang jauh, sulitnya menangkap pelaku pengedar, dan putusan pengadilan yang ringan, dari kendala tersebut akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan terhadap Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum pada masyarakat di wilayah Kecamatan Paciran dan Brondong sudah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Lamongan. Upaya ini merupakan bagian dari upaya preventif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di Kabupaten Lamongan. Upaya yang dilakukan antara lain:²⁶

1. Pemasangan Baliho dan Spanduk himbauan

Upaya pemasangan baliho dan spanduk yang memuat himbauan di tujukan kepada masyarakat agar memahami dan menjauhi narkoba. Spanduk ini dipasang di daerah rawan terjadinya tindak pidana yaitu di Tempat Pelelangan Ikan Brondong dan di sepanjang jalur pantura Lamongan–Tuban–Gresik. Baliho dan spanduk tersebut berisikan tentang himbauan agar masyarakat mengetahui dan berhati-hati terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*. Pemasangan baliho dan spanduk

²⁶Hasil wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S, SH selaku Kepala Sat Resnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

merupakan bentuk kerjasama antara pihak Satresnarkoba Polres Lamongan dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Lamongan.²⁷

2. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan (Binluh) Hukum

Pihak Satuan Resnarkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* diantaranya mengadakan kegiatan pembinaan penyuluhan (binluh) hukum yang dilakukan kepada masyarakat. penyuluhan tersebut difokuskan ke wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara yang merupakan wilayah hukum Polsek Paciran dan Polsek Brondong. Kegiatan pembinaan penyuluhan yang pertama dilakukan oleh Satuan resnarkoba Polres Lamongan yang bekerja sama dengan BNK dan Pemerintah Daerah khususnya Bagian Hukum Kabupaten Lamongan. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor kecamatan setempat dan dihadiri oleh perangkat desa setempat bersama para nelayan. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.²⁸

Penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk pembinaan penyuluhan yang kedua dilakukan oleh pihak satresnarkoba bekerjasama dengan 2 Polsek wilayah utara yaitu Polsek Paciran oleh Kepala Unit Reskrim dan Polsek Brondong oleh Kepala Unit Reskrim dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara intensif 1 bulan sekali secara bergilir.²⁹ Kegiatan penyuluhan tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan fokus kepada para pelajar dan juga kepada para nelayan yang ada di wilayah pantura di Kabupaten Lamongan. Berikut ini akan di jelaskan dengan gambar

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Ipda Sri Iswati selaku Kaur Bin Ops SatResnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 16 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

²⁸ Hasil Wawancara dengan Kasat Resnarkoba AKP Moch Andi Lilik S., SH Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

²⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Iswati selaku Kaurbinops Satresnarkoba Polres Lamongan pada Tanggal 15 April 2015, diolah 2015

kegiatan pembinaan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan:

Penyuluhan hukum ini mempunyai maksud untuk menyikapi situasi kamtibmas saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat bahwa keberadaan dan peredaran narkoba dalam dekade akhir-akhir ini sudah sangat membahayakan generasi muda-mudi sebagai generasi penerus. Secara global sudah sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰ Yang bertujuan menghimbau dan mengajak lapisan masyarakat untuk berani melawan, mencegah, dan memberantas terjadinya penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara gelap ditengah-tengah masyarakat. Untuk menanggulangi pemahaman tentang hukum masyarakat yang masih rendah, Pihak Satresnarkoba Polres Lamongan bisa mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyuluhan dengan cara bekerjasama dengan Pondok Pesantren dan tokoh agama di wilayah Kecamatan Paciran dan Brondong. Hal ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Kecamatan Paciran dan Brondong yang dekat dengan wilayah Pondok Pesantren, sehingga pesan tersebut bisa dititipkan kepada Pondok Pesantren supaya penanggulangan lebih optimal.

b. Upaya Penanggulangan terhadap Target Operasi Jauh

Lokasi yang jauh menjadi kendala bagi Satresnarkoba Polres Lamongan. Karena Polisi sering kehilangan jejak ketika melakukan penangkapan karena pelaku pengedar telah kabur sebelum petugas tiba di lokasi kejadian. Masyarakat dalam memberikan informasi juga langsung ke Polres Lamongan tanpa melalui Polsek setempat.³¹

Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kerjasama yang baik antara Polres Lamongan dengan Polsek setempat yaitu Polsek Paciran dan Polsek Brondong. Karena

³⁰Hasil wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S, SH selaku Kepala Sat Resnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 21 April 2015 Pukul 10.00 WIB, diolah 2015

³¹Hasil Wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S., SH Kepala Sat Resnarkoba Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

kedua polsek tersebut merupakan tempat terjadinya tindak pidana.³² Polisi harus menjalin koordinasi dan komunikasi dalam melakukan tindak lanjut terhadap informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat. Satresnarkoba Polres Lamongan harus sigap dan meneruskan laporan masyarakat kepada Polsek terkait. Sehingga Polsek terdekat bisa melakukan tindak lanjut dan pelaku penyalahgunaan *Carnophen* bisa tertangkap dan tidak kabur.

Hal tersebut harus ditunjang dengan sarana oprasional yang memadai untuk penunjang melakukan pengejaran terhadap pelaku pengedar yang melakukan transaksi jual-beli pil *Carnophen* di atas perahu milik nelayan, penyidik harus bekerja sama dengan salah satu nelayan untuk memberikan informasi dan ikut turun melakukan pengejaran dalam mengungkap peredaran pil *Carnophen* yang dilakukan di atas perahu milik nelayan.

c. Upaya Penanggulangan Mengungkap Jaringan Pelaku Pengedar

Upaya untuk mengungkap jaringan pelaku pengedar yang utamanya bandar besar pil *Carnophen* yang terjadi di Kabupaten Lamongan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan yaitu dilakukan dengan cara Koordinasi dan kerjasama antar wilayah. Jaringan pelaku pengedar yang rapi pada penyalahgunaan peredaran *Carnophen* menjadi kendala dalam pemberantasan kasus ini. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan kesulitan dalam menangkap bandar besar dibalik para pengedar yang ada di Kabupaten Lamongan. Satuan Reserse Narkoba berasumsi ada indikasi keterlibatan pengedar dari Kabupaten Tuban, mengingat beberapa tersangka mengaku memperoleh pil *Carnophen* dari wilayah Kabupaten Tuban.³³

Permasalahan utama yang dihadapi Satresnarkoba Polres Lamongan sampai saat ini terkendala penangkapan bandar besar pil *Carnophen*, oleh karena itu perlu dibentuk tim khusus yang khusus menangani kasus

³²Hasil Wawancara dengan Kasat Resnarkoba AKP Moch Andi Lilik S., SH Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

³³Hasil Wawancara dengan Kasat Resnarkoba AKP Moch Andi Lilik S., SH Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

peredaran pil *Carnophen*, disamping itu luasnya wilayah Kabupaten Lamongan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga banyak celah dan perkembangan modus kejahatan yang dilakukan oleh bandar tersebut. Salah satu upaya yang efektif perlu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang khusus menangani kasus tersebut yang dilakukan dengan cara melakukan suatu kerjasama antar wilayah untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Satresnarkoba Polres Tuban. Satresnarkoba Polres Lamongan dan Polres Tuban bisa melakukan operasi gabungan yang dilakukan fokus untuk memberantas bandar *Carnophen*. Koordinasi antar wilayah dengan aparat penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* merupakan kejahatan yang terorganisir yang sangat luas.

d. Upaya Penanggulangan Putusan Pengadilan yang Ringan

Adanya putusan pengadilan yang ringan yang telah diberikan kepada para pelaku pengedar *Carnophen* merupakan penyebab kendala eksternal yang dihadapi pihak Satresnarkoba Polres Lamongan, walaupun putusan tersebut sudah melalui dasar pertimbangan dari berbagai kepentingan. hal ini justru sangat menciderai rasa keadilan, ketika Polri dan Kejaksaan serta masyarakat yang sudah sedemikian serius, keras dan tegas melakukan upaya pemberantasan peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*, namun putusan pengadilan sangat ringan yang menyebabkan peredaran *Carnophen* di Kabupaten Lamongan semakin merajalela dan meningkat setiap tahunnya.³⁴

Hukuman yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar sehingga pengulangan kasus dan penyalahgunaan akan terus terjadi dan bertambah banyak di tahun yang akan datang. pemberantasan

³⁴ Hasil Wawancara dengan bapak AIPTU Jinanto, SH Kaurmintu Sat Resnarkoba Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

kasus penyalahgunaan *Carnophen* bisa efektif jika peraturan perundang-undangan mengenai hukuman bagi para pengedar diperberat.³⁵

Upaya penanggulangan putusan pengadilan yang ringan adalah pihak Satresnarkoba Polres Lamongan wajib untuk melakukan komunikasi, kordinasi secara mendalam terhadap aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan Pengadilan Negeri Lamongan di dalam pemberian putusan terhadap pelaku pengedar. Upaya selanjutnya dengan melakukan revisi Undang-Undang dan peraturan terkait. Upaya ini ditujukan pada pemerintah (legislator). supaya pelaku pengedar *Carnophen* dapat dikenakan Undang-Undang tentang Narkotika, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat merusak pikiran diri sendiri dan masa depan generasi muda bangsa dan dapat memicu terjadinya kejahatan lain. Selain itu di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan didalamnya belum mengatur tentang ancaman pidana untuk para pelaku pengguna obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*, oleh karena itu di dalam Undang-Undang tersebut terdapat celah hukum yang di manfaatkan oleh masyarakat untuk terus mengkonsumsi pil *Carnophen*.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan, dibagi menjadi dua kendala antara lain:
 - a. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah personil Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan di dalam melakukan operasi penangkapan pelaku pengedar, minimnya anggaran dana, serta terbatasnya sarana dan prasarana khususnya penyediaan ruang penjara bagi pelaku pengedar yang jumlahnya terbatas.
 - b. Kendala eksternal meliputi terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat, Jarak lokasi target operasi jauh Hal ini

³⁵Hasil Wawancara dengan bapak AKP Moch Andi Lilik S., SH Kepala Sat Resnarkoba Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 08.30 Wib, diolah 2015

menyebabkan Satresnarkoba Polres Lamongan kehilangan jejak penangkapan pelaku, sulitnya mengungkap jaringan pelaku pengedar (bandar) untuk mengembangkan kasus sampai ke rantai atas dikarenakan jaringan antar pelaku pengedar sangat rapi dan tertutup, serta putusan pengadilan yang ringan yang menyebabkan pelaku pengedar nantinya akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana tersebut. Dan tidak jera dengan hukuman yang telah diberikan.

2. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* di kalangan nelayan.

a. Upaya internal

Upaya yang telah dilakukan Satresnarkoba selama ini meliputi kerjasama dengan polsek setempat dan membuat kerjasama tidak tertulis antar 3 lembaga tinggi negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kerjasama tersebut berisi kesepakatan bahwa pemrosesan pelaku penyalahgunaan *Carnophen* hanya bisa diproses jika barang bukti yang diperoleh lebih dari 50 butir. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala internal antara lain: melakukan penambahan jumlah personil Satresnarkoba Polres Lamongan, memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal, dan melakukan pengajuan permohonan anggaran dana serta penambahan jumlah sarana dan prasarana khususnya penjara yang memadai.

b. Upaya eksternal yang dilakukan untuk menghadapi kendala eksternal dilakukan dengan cara pemasangan baliho/spanduk himbauan, melakukan sosialisasi kegiatan pembinaan penyuluhan hukum yang ditujukan kepada nelayan yang ketergantungan obat tentang bahaya pil *Carnophen*, dan bekerjasama dengan polsek sekitar dalam melakukan tindak lanjut terhadap informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat, dan menjalin kerjasama dan koordinasi antar wilayah yang baik dengan Satresnarkoba Polres Tuban, serta upaya terhadap putusan pengadilan yang ringan dilakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum yang lain

Kejaksaan, Pengadilan Negeri Lamongan dalam pemberian putusan serta upaya melakukan revisi Undang-Undang yang ditujukan kepada Pemerintah.

A. Saran

1. Pihak Satresnarkoba Polres Lamongan perlu penambahan jumlah personil dilakukan *recruitment* tenaga baru untuk menambah dan mendukung kinerja dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba secara umum, dan mengajukan permohonan anggaran dana, serta perluasan sarana prasarana khususnya penjara untuk para pelaku pengedar pil *Carnophen*, sehingga dapat menampung jumlah pelaku tindak pidana yang ada.
2. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan lebih meningkatkan upaya dalam penangkapan pelaku pengedar (bandar) dengan cara membentuk tim khusus yang telah dibekali pelatihan khusus dan melakukan upaya penindakan lebih mendalam sehingga diharapkan bandar pil *Carnophen* tersebut bisa tertangkap serta bisa menekan angka tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*.
3. Undang-Undang Kesehatan belum mampu untuk menekan angka tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*, Seharusnya Negara melakukan revisi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Diharapkan pelaku pengedar maupun pelaku pengguna dapat dikenakan Undang-Undang tentang narkoba mengingat dampak yang ditimbulkan sama sama merusak pikiran dan masa depan generasi bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**, UUM Press, Malang, 2009.

Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011.

Soedjono D, **Penanggulangan Kejahatan (crime Prevention)**. Alumni, Bandung, 1976.

Soerjono Soekanto, **Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penegakan**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang–undangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

Skripsi

Mohammad Alek Tabrani, *Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (daftar G) Jenis Carnophen (Studi di Kabupaten Tuban)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Surat Kabar

Jawa Pos, **Edarkan Carnophen Nelayan Ditangkap**, edisi 30 Januari 2015.